



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN TUBAN**

**TAHUN ANGGARAN
2021**

Jalan Pahlawan Nomor 10 Telp (0356) 322401
TUBAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 menyajikan pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur dalam pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021. Melalui LAKIP ini dapat menjadikan gambaran dalam melaksanakan tugas dan pertanggungjawaban sesuai dengan garis kebijakan yang telah ditetapkan. Laporan ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dalam menciptakan transparansi informasi guna terciptanya tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) untuk mewujudkan visi misi yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi alat ukur dan evaluasi agar kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban pada periode yang akan datang dapat lebih efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, dan manajemen pelaksanaannya. Kritik dan saran dari seluruh pihak yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan untuk penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak dalam proses pembangunan selama tahun 2021 serta dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2021.

Tuban, Desember 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TUBAN



AGUNG SUPRIYADI, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19710124 199402 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban selama Tahun 2021. Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reormasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban pada tahun 2021 melakukan evaluasi kinerja secara berkala dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2021 serta target kinerja pada akhir Renstra yaitu tahun 2021. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan perbaikan kinerja di tahun yang akan datang. Berdasarkan evaluasi dan pencapaian kinerja terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dapat dinyatakan mencapai hasil yang baik.

Dalam mendukung visi dan misi yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2021 menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai rencana;
2. Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan;
3. Meningkatnya kinerja system irigasi;
4. Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan.

Sasaran tersebut dapat dicapai melalui program kerja dan kegiatan-kegiatan yang didukung dengan anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Tuban dan PAPBD Pemerintah Kabupaten Tuban sehingga pada dasarnya seluruh kegiatan untuk tahun anggaran 2021 dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban.

Adapun hasil kinerja terhadap indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana dengan target 75% dan terealisasi 86,2% sehingga tercapai 115%;
2. Persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam) dengan target 78% dan terealisasi 78% sehingga tercapai 100%;
3. Cakupan ketersediaan air baku/irigasi dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga tercapai 100%; dan
4. Cakupan konektivitas wilayah dengan target 93% dan terealisasi 90,19% sehingga capaian sasaran 97%.

Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala dan masalah dalam pencapaian target kinerja, sehingga diharapkan adanya peningkatan dukungan yang baik dari Pemerintah Kabupaten Tuban maupun dari masyarakat dan berbagai pihak lainnya agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.3.1 Kedudukan	2
1.3.2 Tugas	2
1.3.3 Fungsi	3
1.4 Struktur Organisasi	3
1.5 Sumber Daya Manusia.....	6
1.6 Sarana dan Prasarana	7
1.7 Isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Visi dan Misi	9
2.3 Tujuan dan Sasaran	10
2.3.1 Tujuan.....	11
2.3.2 Sasaran	11
2.4 Strategi Kebijakan dan Program.....	15
2.5 Perjanjian Kinerja	17
2.6 Rencana Kinerja Tahunan	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
3.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021	29
3.2 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja tahun 2021 dengan beberapa tahun terakhir	32
3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2021 Dengan target Jangka Menengah	38
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang dilakukan.....	41
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	43
3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	46
B. REALISASI ANGGARAN.....	49
BAB IV PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Klasifikasi Gol PNS 6
Tabel 2	Klasifikasi Pendidikan 6
Tabel 3	Klasifikasi Jabatan PNS 6
Tabel 4	Visi Bupati Kabupaten Tuban dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2016-2021 9
Tabel 5	Misi Bupati Tuban dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2016-2021 10
Tabel 6	Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab Tuban tahun 2016-2021 12
Tabel 7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Tuban 16
Tabel 8	Matriks Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Tuban 17
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Tuban tahun 2021 18
Tabel 10	Program dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab Tuban tahun 2021 18
Tabel 11	Skala Nilai Perangkat Kinerja 29
Tabel 12	Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis 30
Tabel 13	Pengukuran Kinerja antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 berdasarkan Program/Kegiatan 30
Tabel 14	Realisasi serta Capaian Kinerja tahun 2019-2021 33
Tabel 15	Kondisi Prasarana Pengairan Tahun 2020 dan 2021 36
Tabel 16	Kondisi Prasarana Jalan Tahun 2020-2021 38
Tabel 17	Realisasi kinerja tahun 2020 dan target Jangka menengah 38
Tabel 18	Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Sasaran strategis 43
Tabel 19	Efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Program 44
Tabel 20	Rincian Anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab Tuban Tahun 2021 49

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1	Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana..... 34
Grafik 2	Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan 34
Grafik 3	Cakupan Ketersediaan Air Baku/Irigasi..... 35
Grafik 4	Cakupan Konektivitas Wilayah..... 37
Grafik 5	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Jangka Menengah untuk indikator persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana 39
Grafik 6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Jangka Menengah untuk indikator penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam) 39
Grafik 7	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Jangka Menengah untuk indikator cakupan ketersediaan Air baku/Irigasi 40
Grafik 8	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target Jangka Menengah untuk indikator cakupan konektivitas wilayah..... 40
Grafik 9	Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diberikan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran selama 1 tahun.

Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban merupakan laporan yang berisi mengenai kinerja yang dicapai selama tahun 2021. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Surat Bupati Tuban Nomor 069.5/51/414.032/2021 tanggal 6 Januari 2022. LAKIP ini juga berisi gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan serta indikator, baik keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja yang telah dicapai pada tahun/periode tertentu.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2018 tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja. Urusan yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban adalah urusan pekerjaan umum.

Pandemic covid-19 yang terjadi dari tahun 2020 di Indonesia hingga sekarang merupakan wabah yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk pembangunan. Isu strategis yang dialami oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban selama masa pandemic yaitu tingkat pembangunan infrastruktur yang belum optimal baik infrastruktur jalan, jembatan, penataan bangunan, tata ruang,

maupun infrastruktur pengendali banjir dan irigasi. Hal tersebut berdampak pada keterlambatan pelayanan kepada masyarakat.

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dijalankan. Program dan kegiatan yang dijalankan selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban diharapkan bisa mendukung pencapaian hasil yang diinginkan sesuai dengan visi, misi dan sasaran Bupati Tuban.

1.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban adalah:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2021;
3. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 65 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, sebagai berikut:

1.3.1 Kedudukan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3.2 Tugas

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta

tugas Pembantuan yang diberikan kepala Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan prasarana bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Tata Ruang, tata bangunan dan Pertanahan serta Perencanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

1.3.3 Fungsi

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan serta Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan serta Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi;
- 3) Pembinaan pendampingan dan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, Bidang tata ruang, Tata Bangunan dan pertanahan serta Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi;
- 4) Penyelenggaran urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta program dan pelaporan;
- 5) Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- 6) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

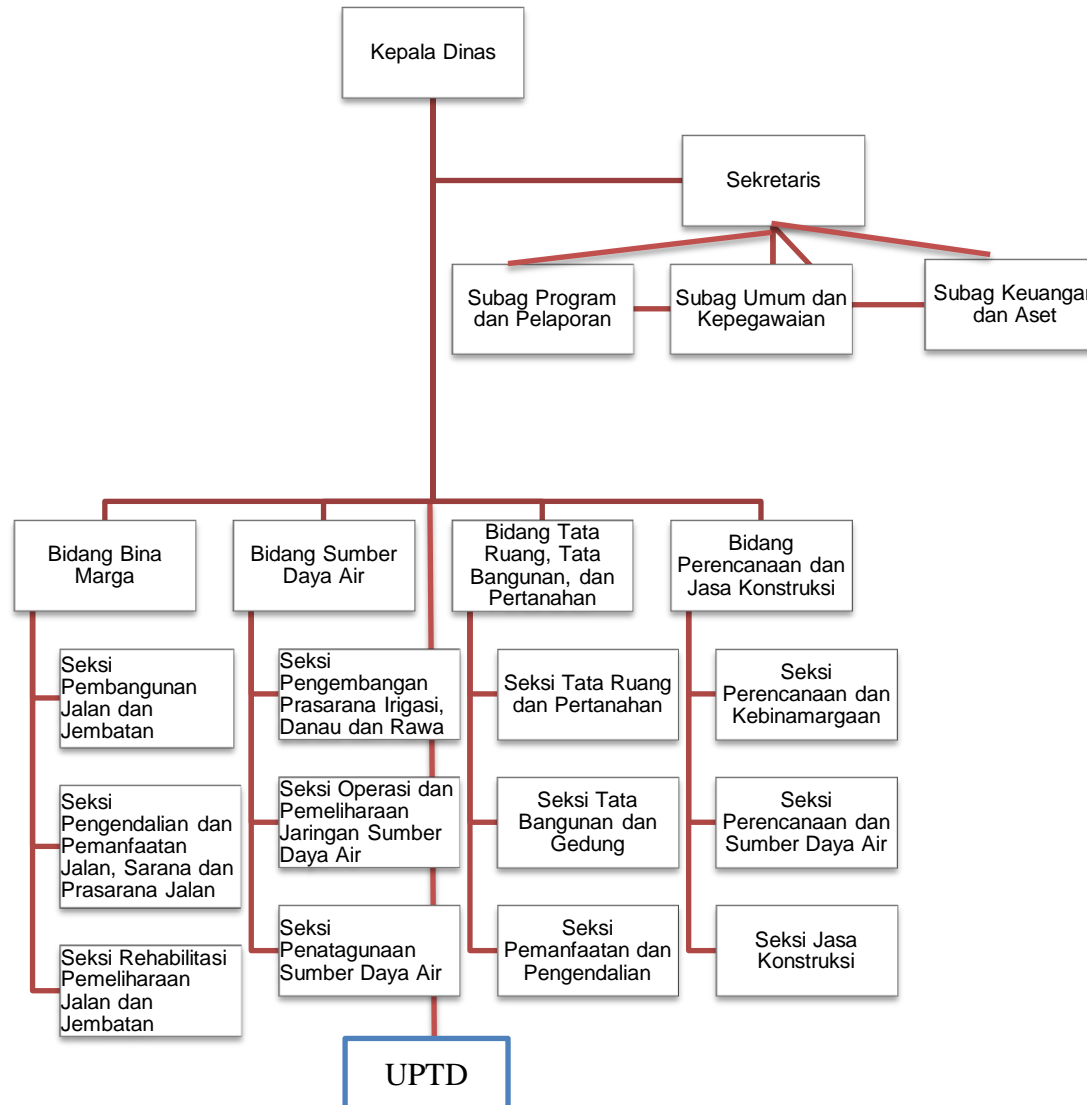
1.4 Struktur Organisasi

Susunan Organsasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas, memimpin Dinas yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- b. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Progam dan Pelaporan

- c. Bidang Bina Marga, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Jalan; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Sumber Daya Air, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Sumber Daya Air selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - 1. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau Dan Rawa;
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber daya Air;
 - 3. Seksi Penataan Sumber Daya Air
- e. Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - 1. Seksi Tata Ruang dan Pertanahan;
 - 2. Seksi Tata Bangunan dan Gedung; dan
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian
- f. Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi, yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi selanjutnya membawahkan dan mengkoordinasikan:
 - 1. Seksi Perencanaan Konstruksi Sumber daya Air;
 - 2. Seksi Perencanaan Konstruksi ke Bina margaan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas. UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD terdiri atas 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional. UPTD terdiri dari:
 - 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas 5 Kecamatan;
 - 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan; dan
 - 3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TUBAN**



1.5 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir bulan Desember 2021 Jumlah Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban sebanyak 148 orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 126 orang, Tenaga Kontrak 5 orang dan Outsourcing 17 orang. Gambaran SDM yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Klasifikasi Golongan PNS

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	Golongan IV	6 Orang
2	Golongan III	55 Orang
3	Golongan II	59 Orang
4	Golongan I	6 Orang
5	Non PNS	22 Orang
JUMLAH PEGAWAI		148 Orang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Tabel 2 Klasifikasi Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	4 Orang
2	S1	43 Orang
3	D3	9 Orang
4	SMA/SMK	60 Orang
5	SMP	4 Orang
6	SD	6 Orang
JUMLAH PEGAWAI		126 Orang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Tabel 3 Klasifikasi Jabatan PNS

NO	GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	Struktural	21 Orang
2	Fungsional	6 Orang
3	Staf	99 Orang
4	Non PNS	22 Orang
JUMLAH PEGAWAI		148 Orang

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

1.6 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban merupakan salah satu penunjang utama di dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu antara lain :

- a. Tanah
- b. Bangunan Gedung
- c. Kendaraan Bermotor Roda Dua
- d. Kendaraan Bermotor Roda Empat
- e. Inventaris Alat Berat
- f. Inventaris Alat Ukur/Laboratorium
- g. Inventaris-inventaris lainnya.

1.7 ISU STRATEGIS

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peranan penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain pembangunan sarana dan prasarana di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan serta infrastruktur gedung. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, antara lain, mencapai kedaulatan pangan, ketahanan air, peningkatan konektivitas jalan dan peningkatan infrastruktur gedung dan non gedung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dinamika perubahan lingkungan strategis baik internal maupun external berpengaruh terhadap tingkat pelayanan. Apalagi di era *pandemic covid-19* yang terjadi di Indonesia dari tahun 2020 hingga sekarang turut andil mempengaruhi capaian kinerja baik dari program dan kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, meliputi :

1. Belum maksimalnya cakupan konektivitas wilayah;

2. Belum Optimalnya Kinerja Sistem Irigasi untuk Daerah Irigasi (D.I) untuk menunjang produktivitas pertanian dan kedaulatan pangan;
3. Belum terkelolanya sumber air baku secara maksimal.
4. Masih terdapatnya kawasan rawan banjir.
5. Belum terdapatnya rencana rinci tata ruang yang operasional sebagai dasar pedoman pengembangan/pemanfaatan ruang yang berkualitas.
6. Pembinaan, Pelaksanaan dan Penataan Bangunan, belum terselenggarakan dengan baik.
7. Pengelolaan Gedung dan Rumah milik negara belum optimal.
8. Masih kurangnya tenaga ahli di bidang Jasa Kontruksi yang berkualitas

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor–faktor yang mempengaruhi antara lain: Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, Belum adanya tenaga pengawas yang mempunyai sertifikasi, Kurangnya pemahaman untuk membuat SOP, Sering terjadi bencana alam.

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal yang terjadi selama tahun 2021, maka yang harus dilakukan adalah:

1. Peningkatan cakupan konektivitas wilayah melalui penanganan dan mempertahankan kondisi mantap Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan
2. Peningkatan Kinerja Sistem Irigasi untuk Kawasan Pertanian
3. Penanganan Konservasi dan Pengendalian Banjir
4. Peningkatan Produk Penataan Ruang secara rinci dan opeasional
5. Peningkatan Kualitas Bangunan Gedung melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi
6. Peningkatan perencanaan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin muncul.

2.2 Visi dan Misi

Visi mengandung arti rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai – nilai luhur dan dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Tuban dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban menetapkan visi:

Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Sehat, Bersih, Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 4. Visi Bupati Kabupaten Tuban dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2016-2021.

VISI	
Bupati Tuban	Kabupaten Tuban yang lebih religius, Bersih, Maju, dan Sejahtera.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban	Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat yang Sehat, Bersih, Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Tuban dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Tuban mengacu pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah dan pengendalian banjir
2. Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastuktur kewilayahan
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 5 Misi Bupati Tuban dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2016-2021

MISI	
Bupati Tuban	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban
<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Tata kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Kreatif dan Bersih. b. Peningkatan Pembangunan Berkelanjutan dan Optimiliasi Penataan Ruang Guna Mendorong Kemajuan Daerah c. Membangun Struktur Ekonomi Daerah yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Lokal yang Kompetitif d. Meningkatkan kualitas Berlandaskan Keunggulan dan konektivitas Lokal yang Kompetitif infrastuktur kewilayahan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah b. Mewujudkan Penataan Ruang Sebagai Upaya Pengembangan Wilayah dan pengendalian banjir c. Meningkatkan kualitas dan konektivitas infrastuktur kewilayahan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

2.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk keberhasilan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi.

2.3.1 Tujuan

Tujuan yaitu hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang dirumuskan berdasarkan visi dan misi. Dimana tujuan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban adalah :

1. Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel;
2. Optimalisasi penataan ruang dan peningkatan kualitas infrastruktur pengendali banjir;
3. Meningkatnya ketersediaan air baku/irigasi dan konektivitas antar wilayah.

2.3.2 Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan dan peningkatan keandalan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkelanjutan, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penetapan sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai rencana
3. Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan
4. Meningkatnya kinerja Sistem Irigasi
5. Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan

Matrik tujuan dan sasaran jangka menengah masing masing Misi beserta indikator dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6 Tujuan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke				
					1	2	3	4	5
Terwujudnya Perangkat Daerah yang akuntabel		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah DPUPR		CC	B	B	BB	A
Optimalisasi penataan ruang dan peningkatan kualitas infrastruktur pengendali banjir	Tingkat pemanfaatan ruang sesuai rencana	Meningkatnya Pemanfaatan ruang sesuai rencana	Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana	Jumlah luas pemanfaatan ruang dibagi Jumlah luas rencana tata ruang x 100%	15	20	40	60	75
				Jumlah luas pemanfaatan ruang	26.975	35.975	72.900	110.000	138.000
				Jumlah luas RTR	183.994	183.994	183.994	183.994	183.994
	Cakupan Infrastruktur pengendali banjir di wilayah rawan genangan	Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan	Persentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%)	Luas daerah genangan pada tahun dasar dikurangi luas daerah genangan pada tahun n dibagi total luas daerah genangan x 100%	66	69	72	75	78
				Luas daerah genangan pada tahun dasar	14,541	14,541	14,541	14,541	14,541
				Luas daerah genangan pada tahun n	5.467	4.945	4.100	3.600	3.200

Meningkatnya ketersediaan air baku/irigasi dan Konektivitas antar wilayah	Persentase Ketersediaan air baku/irigasi	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Cakupan Ketersediaan Air Baku/Irigasi (%)	Jumlah ketersediaan air irigasi/air dibagi jumlah kebutuhan air irigasi /air bakux100%	75	80	83	85	100
				Jumlah ketersediaan air baku (liter/detik)	6.852	7.308	7.583	7.766	9.136
				Jumlah kebutuhan air irigasi/air baku (liter/detik)	9.136	9.136	9.136	9.136	9.136
	Cakupan Konektivitas Wilayah jalan dan jembatan	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Cakupan Konektivitas Wilayah (%)	Jumlah akhir tahun SPM panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi dibagi dengan target keseluruhan panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi x 100%	85	87	89	91	93
				Jumlah akhir tahun SPM panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi	1.565	1600	1634	1.666	1.703
				Target keseluruhan panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi	18411	18411	18411	18411	18411

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

2.4 Strategi, Kebijakan dan Program

Merujuk pada visi dan misi serta tujuan dan sasaran maka rumusan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan sarana prasarana aparatur yang memadai, peningkatan disiplin aparatur serta sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang optimal;
2. Meningkatkan kualitas / kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan mendukung konektivitas wilayah;
3. Mengoptimalisasikan pengelolaan dan pemeliharaan bangunan pengairan, penyediaan air baku dan pengendalian banjir;
4. Mengupayakan secara optimal peraturan dan kebijakan di bidang penataan ruang, penataan bangunan dan terhadap guna pertanahan.

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai akhir tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah;
2. Mewujudkan konektivitas wilayah melalui penyediaan jalan dan jembatan pada jalan kabupaten, jalan poros desa yang mantap;
3. Mewujudkan tersedianya kebutuhan air baku dan sumber air , jaringan irigasi dan infrastruktur pengairan lainnya;
4. Mewujudkan tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dan Pembangunan kawasan;
5. Pengoptimalkan pelaksanaan Perda bangunan gedung melalui kegiatan penyusunan peraturannya pelaksanaanya dan sosialisasi; dan
6. Mewujudkan sarana bangunan pengendali banjir.

Tabel 7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Upaya peningkatan Pelayanan Admnsitrasi Perkantoran dan sarana prasarana aparatur yang memadai, peningkatan disiplin aparatur serta sistem perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang optimal	a. Optimalisasi Pelayanan administrasi Perkantoran yang memadai; b. Optimalisasi peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur c. Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD
Optimalisasi penataan ruang dan peningkatan kualitas infrastruktur pengendali banjir	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai rencana	Mengupayakan secara optimal peraturan dan kebijakan dibidang penataan ruang, penataan bangunan dan terhadap guna pertanahan	a. Mewujudkan tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang dalam rangka Pengendalian pemanfatan ruang dan Pembangunan kawasan; b. Pengoptimalkan pelaksanaan perda bangunan gedung;
	Berkurangnya genangan air di wilayah rawan genangan	Mengoptimisasikan pengelolaan dan pemeliharaan bangunan pengairan, penyediaan air baku dan pengendalian banjir	Mewujudkan tersedianya kebutuhan air baku dan sumber air , jaringan irigasi dan infrastruktur pengairan lainnya
Meningkatnya ketersediaan air baku/irigasi dan Konektivitas antar wilayah	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Mengoptimisasikan pengelolaan pemeliharaan pengairan , penyediaan air baku dan banjir	Mewujudkan tersedianya kebutuhan air baku dan sumber air , jaringan irigasi dan infrastruktur pengairan lainnya.
	Cakupan Konektivitas Wilayah jalan dan jembatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dan jembatan mendukung konektivitas wilayah	Mewujudkan konektivitas melalui jalan dan jembatan pada jalan kabupaten, poros desa yang mantap

Dari penetapan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan memperhatikan analisis lingkungan internal dan eksternal maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun kedepan sejalan dengan misi yang ditetapkan sebagaimana matriks berikut:

Tabel 8 Matriks Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM
Terwujudnya Perangkat Daerah yang Akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Optimalisasi penataan ruang dan peningkatan kualitas infrastruktur pengendali banjir	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai rencana	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2. Program Penataan Bangunan Gedung 3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Meningkatnya ketersediaan air baku/irigasi dan Konektivitas antar wilayah	Meningkatnya kinerja system irigasi	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan	1. Program Penyelenggaraan Jalan

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

2.5 Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja telah ditetapkan bersama antara Bupati Tuban dengan Kepala Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dari Perjanjian Kinerja tersebut memuat Penetapan Kinerja.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban mencakup sasaran strategis, indikator sasaran, target dan program serta anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas PUPR.

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan ruang sesuai rencana	Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana (%)	75%
2	Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan	Persentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) (%)	78%
3	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Cakupan Ketersediaan Air Baku/Irigasi (%)	100%
4	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Cakupan Konektivitas Wilayah (%)	93%
5	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat daerah DPUPR	81,32 (A)

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Tabel 10 Program dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2021

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1.275.000.000,00	APBD+PAPBD
2	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 41.594.437.500,00	APBD+PAPBD
3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 800.000.000,00	APBD+PAPBD
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 25.000.000,00	APBD+PAPBD
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 67.536.598.254,00	APBD+PAPBD
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 169.099.857.437,00	APBD+PAPBD
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.989.296.797,00	APBD+PAPBD
Total Anggaran		Rp 296.320.189.988,00	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

2.6 Rencana Kinerja Tahunan 2021

Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Hal tersebut untuk mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2021. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2021 dapat dilihat melalui tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target	Anggaran
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai rencana	Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana	75%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersusunnya dokumen rencana tata ruang	81,25%	1,275,000,000,00
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang ditetapkan	3 dok	1.175.000.000,00
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang Tersusun	4 dok	1.175.000.000,00
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persetujuan Pemanfaatan Ruang	1 paket	100.000.000,00
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	3 dok	100.000.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target	Anggaran
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung sesuai SLF BG	100%	41.594.437.500,00
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah SLF yang diterbitkan	1 paket	41.594.437.500,00
				Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah SLF yang diterbitkan	1 paket	99.972.500,00
				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubah sesuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SLF yang diterbitkan	1 paket	41.494.465.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target	Anggaran
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung negara yang mendapat pembinaan teknis	6%	800.000.000,00
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peraturan/hasil kajian yang disusun	3 dok	800.000.000,00
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peraturan/hasil kajian yang disusun	5 paket	800.000.000,00
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase cakupan tersediannya 7 (tujuh) layanan informasi Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten	100%	25.000.000,00
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib	Jumlah dokumen monitoring,	1 dok	25.000.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target	Anggaran
				Pemanfaatan Jasa Konstruksi	pengawasan dan pengendalian kualitas jasa konstruksi		
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen monitoring, pengawasan dan pengendalian kualitas jasa konstruksi	1 dok	25.000.000,00
2	Meningkatnya kinerja system irigasi	Cakupan ketersediaan air baku/irigasi	100%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	97,27%	67.536.598.254,00
3	Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan	Persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam)	78%		Persentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik	100%	
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan	Panjang Saluran Irigasi dalam	2600m	29.990.491.390,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Anggaran
				Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha	kondisi baik		
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang dibangun (m)	150m	2.010.000.085,00
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang direhabilitasi (m)	1850m	4.867.712.338,00
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara (m)	600m	22.172.778.967,00
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis SDA	6 dok	940.000.000,00
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang infrastruktur pengendali banjir yang dibangun(m)	6065 m2	37.546.106.864,00
				Pembangunan Bendungan	terbebaskannya lahan pembangunan loongstroge	125574 m2	18.836.120.000,00
				Pembangunan Tanggul Sungai	terbebaskannya lahan	24680 m2	6.169.960.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Anggaran
					pembangunan waduk tanggul sungai		
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang tanggul sungai yang dibangun (m)	2600m	5.959.953.141,00
				Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	Jumlah danau yang direhabilitasi (bh)	3 Unit	630.074.048,00
				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah HIPPA yang dibentuk/dibina (Unit lembaga)	2 Unit Lembaga	49.999.675,00
				Operasional dan Pemeliharaan Sungai	luas sungai yang ternormalisasi	15000 m2	5.900.000.000,00
4	Meningkatnya Cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Cakupan konektivitas wilayah	93%	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan/ jembatan kabupaten/ poros desa dalam kondisi baik	93%	169.099.857.437,00
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang jalan yang ditangani	199.05 km	169.099.857.437,00
				Perencanaan Teknis	Jumlah Dokumen	5 Dok	860.000.000,00
				Pembebasan Lahan /Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Lahan yang dibebaskan	291 m2	255.000.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target	Anggaran
				Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen	1 Dok	100.000.000,00
				Survey Kondisi Jalan	Jumlah Dokumen	4 Dok	400.000.000,00
				Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditangani	90 m	600.000.000,00
				Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang jalan yang ditangani	5500 m	6.790.000.000,00
				Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang ditangan	500 m	18.140.500.000,00
				Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang ditangani Panjang saluran yang ditangani Panjang TPT yang ditangani	123 m 7116 m 2910 m	25.047.050.000,00
				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	191360 m	61.975.500.000,00
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara pengadaan aspal	31100 m 1 paket	38.299.307.075,00
				Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang ditangani	64 m	6.855.000.362,00
				Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang ditangani	52 m	4.717.500.000,00
				Rehabilitasi Jembatan	panjang jalan yang ditangani	660 m	5.060.000.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target	Anggaran
						JUMLAH	280.330.893.191,00
PROGRAM/KEGIATAN PENDUKUNG (SEKRETARIAT)							
5	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai AKIP Perangkat Daerah	A	15.989.296.797,00
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	160.214.600,00
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian	4 dokumen	71.833.500,00
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja, Pelaporan dan Publikasi	5 dokumen	88.381.100,00
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	9 Dokumen	13.987.323.910,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target	Anggaran
					Yang Disusun		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Penerima Gaji dan Tunjangan	142 orang	13.611.396.410,00
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	375.927.500,00
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan Perkantoran	5 Jenis	596.276.657,00
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 tahun	6.000.000,00
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 tahun	195.498.707,00
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 tahun	156.778.200,00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 tahun	49.999.750,00
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peralatan Perkantoran	1 tahun	18.000.000,00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah yang Diikuti	150 kali	170.000.000,00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	5 jenis	687.259.580,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target	Anggaran
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	16 kali	5.790.000,00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 tahun	192.600.000,00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran	1 tahun	15.500.000,00
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah jenis Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	1 tahun	473.369.580,00
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang dipelihara	5 Jenis	558.222.050,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 tahun	243.494.050,00
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 tahun	24.960.000,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis / IKU	Target Kinerja Sasaran	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Subkegiatan	Target	Anggaran
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 tahun	134.768.000,00
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 tahun	155.000.000,00
JUMLAH							15.989.296.797,00
TOTAL KESELURUHAN							296.320.189.988,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kabupaten, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan.

Penilaian capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban menggunakan rumus realisasi dibagi dengan target dikali 100% (seratus persen). Dari hasil pengumpulan data dan perhitungan selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 11. Skala Nilai Perangkat Kinerja

No	Interval Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat baik	Biru Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Biru Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Hijau
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

3.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021. Sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 12 Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Tingkat Capaian (%)	Kriteria/ Kode
Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai rencana	Persentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana	75	86,2	115%	Biru Tua
Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan	Persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam)	78	78	100%	Biru Tua
Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Cakupan ketersediaan air baku/irigasi	100	100	100%	Biru Tua
Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Cakupan Konektivitas Wilayah	93	90,19	97%	Biru Tua
RATA-RATA CAPAIAN				103%	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Tabel 13 Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Berdasarkan Program Dinas

Program	Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Capaian	Kode
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase tersusunnya dokumen rencana tata ruang	81,25%	81,25%	100	Tercapai	Biru Tua
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung sesuai SLF BG	100%	100%	100	Tercapai	Biru Tua
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase bangunan gedung negara yang mendapat pembinaan teknis	6%	6%	100	Tercapai	Biru Tua
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase cakupannya 7 (tujuh) layanan informasi Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten	100%	100%	100	Tercapai	Biru Tua
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	97,27%	97,27%	100	Tercapai	Biru Tua
	Persentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik	100%	100%	100	Tercapai	Biru Tua

Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan/ jembatan kabupaten/ poros desa dalam kondisi baik	93%	90,19%	97	Belum tercapai	Biru Tua
-------------------------------	---	-----	--------	----	----------------	----------

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat capaian kinerja dari indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 menunjukkan hasil yang sangat baik yaitu 103%. Serta menunjukkan keberhasilan pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dilaksanakan selama tahun 2021.

Berdasarkan tabel 12 dan 13 di atas, berikut penjelasannya:

1. Persentase Luas Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana

Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana sebesar 86,2% dengan target sebesar 75%, yang menunjukkan bahwa target pada tahun 2021 dapat dicapai, dengan tingkat pencapaian 115%.

Program yang menunjang indikator kinerja tersebut yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan target 81,25% dan realiasi sebesar 81,25% dengan tingkat capaian 100%. Kegiatan yang menunjang program ini adalah penyusunan rencana tata ruang dan pertanahan.
- b. Program Penataan Bangunan Gedung dengan target 100% dan realisasi sebesar 75%. Tingkat capaian pada program ini sebesar 100%. Kegiatan yang menunjang adalah penyelenggaraan pengendalian dan pemanfaatan ruang.
- c. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan target 6% dan realisasi sebesar 75%. Berarti tingkat capaian pada program ini adalah 100% dengan didukung kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung negara dan penunjangnya serta penataan bangunan gedung dan lingkungan.
- d. Program Pengembangan Jasa Konstruksi sudah tercapai sebesar 100%.

2. Persentase Penurunan Genangan (Lebih Dari 30cm Selama 2 Jam)

Persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam) sebesar 78% dengan target 78% yang menunjukkan bahwa target pada tahun 2021 terpenuhi dengan tingkat pencapaian 100%. Keberhasilan ini salah satunya didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dimana juga mencapai target dengan capaian 100%. Serta kegiatan yang mendukung program ini adalah Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Cakupan Ketersediaan Air Baku/Irigasi

Meningkatnya kinerja system irigasi dengan persentase Cakupan ketersediaan air baku/irigasi sebesar 100% dengan target sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa target pada tahun 2021 dapat tercapai dengan tingkat pencapaian 100%. Keberhasilan ini didukung oleh Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). dan kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha.

4. Cakupan Konektivitas Wilayah

Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan dengan indikator kinerja cakupan konektivitas wilayah dengan target sebesar 93% dan capaian kinerja sebesar 90,19%. Tingkat capaian kinerja yaitu 97%. Program yang mendukung sasaran dan indikator kinerja ini adalah program penyelenggaraan jalan dengan didukung kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Kondisi jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan dan belum memenuhi target yaitu dari target tahun 2021 sebesar 93 % realisasinya hanya dapat dicapai sebesar 90,19 % (tidak memenuhi target) akan tetapi realisasi capaian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 88,88 %. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2021, sedangkan untuk realisasi indikator kinerja tidak mencapai target disebabkan adanya kerusakan pada sebagian ruas jalan yang baru selesai diadakan penanganan sering disusul adanya kerusakan pada titik-titik lainnya, yang semula dalam kondisi baik menjadi kondisi sedang bahkan menurun menjadi rusak, disamping itu juga adanya curah hujan yang tinggi, akan tetapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya terus didalam penanganan jalan/jembatan baik berupa pekerjaan pemeliharaan berkala atau rutin maupun peningkatan dan pelebaran serta sarana dan prasarana jalan.

3.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

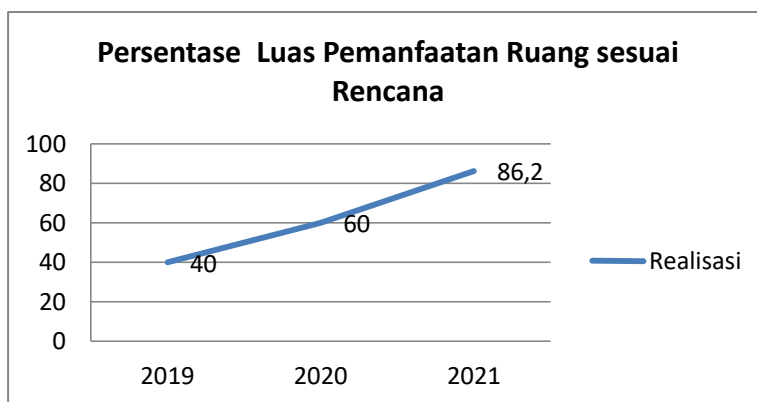
Tabel 14 Realisasi serta Capaian Kinerja tahun 2019-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai rencana	Persentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana	40%	40%	100%	60%	60%	100%	75%	86,2%	115%
2	Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan	Persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam)	72%	72%	100%	75%	75%	100%	78%	78%	100%
3	Meningkatnya kinerja sistem irigasi	Cakupan ketersediaan air baku/irigasi	83%	83%	100%	85%	85,2%	100,23%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Cakupan Konektivitas Wilayah	89%	93,8%	105,39%	91%	88,88%	97,67%	93%	90,19%	97%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

1. Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana

Grafik 1. Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana

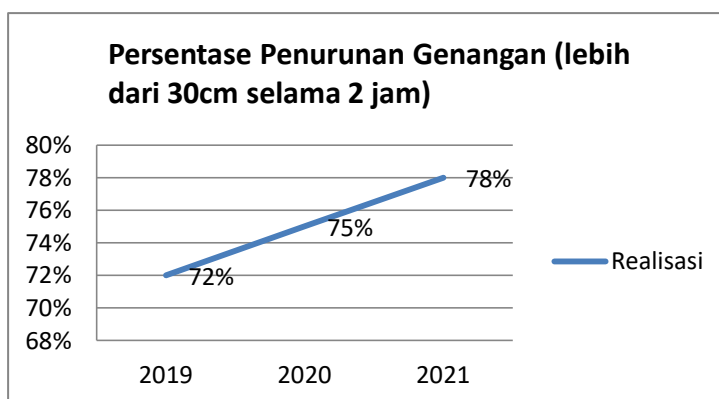


Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan indikator kinerja persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana mengalami peningkatan kinerja dari 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019 tercapai 40%. Tahun 2020 tercapai 60%, sedangkan tahun 2021 tercapai 86,2% dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satu permasalahan dalam penataan ruang adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun. Perubahanan fungsi lahan pertanian tersebut antara lain berubahnya fungsi menjadi lahan terbangun terutama untuk perumahan, perdagangan dan industri. Dalam rangka meningkatkan ketaatan terhadap Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dalam hal ini di pengaruhi oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota, maka dibutuhkan dokumen rencana tata ruang yang sifatnya detail dan operasional untuk perijinan.

Kondisi tersebut disebabkan upaya yang terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketersediaan regulasi terkait rencana detail tata ruang, di mana akan dilakukan secara bertahap mulai dari proses penyusunan, materi teknis, penyusunan raperda, hingga menjadi perda.

2. Berkurangnya Genangan di Wilayah Rawan Genangan

Grafik 2. Persentase Penurunan Genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam)

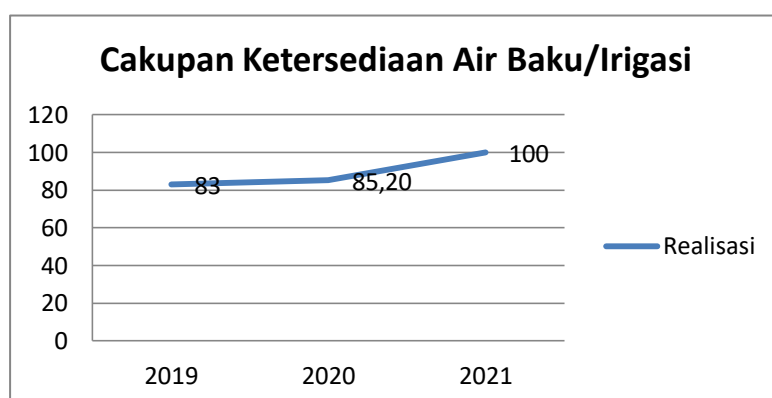


Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut masih mengalami peningkatan progress kinerja dari 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019 realisasi kinerja yang didapatkan yaitu 72%, tahun 2020 realisasi kinerja yang didapatkan yaitu 75%, sedangkan pada tahun 2021 realisasi kinerja yang didapatkan yaitu 78%.

Untuk itu pada persentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam) dalam Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Tuban sebagai lumbung padi di Jawa Timur tidak lepas dari bencana banjir pada kawasan persawahan. Dalam rangka penanganan dan pengendalian banjir pada areal persawahan, maka dibutuhkan infrastruktur saluran pembuang yang memadai. Genangan pada areal pertanian pada awal tahun 2015 seluas 5467 Ha atau telah mencapai pengurangan 62%. Setelah dilakukan penanganan, pada tahun 2021 luas genangan menjadi 3.200 Ha atau telah tercapai target genangan 78 % dari target tahun 2021 seluas 3.200 Ha (78%) sehingga capaian target pada tahun 2021 telah dapat dipenuhi.

3. Meningkatkan Kinerja System Irigasi

Grafik 3. Cakupan ketersediaan air baku/irigasi



Persentase cakupan ketersediaan air baku/irigasi, menggambarkan persentase jumlah ketersediaan air irigasi/air baku dibagi kebutuhan air irigasi /air baku. Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 dengan realisasi sebesar 83%, tahun 2020 dengan realisasi sebesar 85% dan di tahun 2021 mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar 100%.

Pada Cakupan Ketersediaan Air Baku/Irigasi ini, irigasi merupakan prasarana untuk meningkatkan produktivitas lahan, baik dalam meningkatkan produktivitas per hektar, maupun meningkatkan intensitas panen pertahun. Dalam menunjang ketersediaan air baku irigasi untuk pertanian, dibutuhkan infrastruktur irigasi yang memadai. Sedangkan untuk mengetahui capaian persentase ketersediaan air

maka dilakukan dengan cara membandingkan antara ketersediaan air baku pada sawah dengan kebutuhan total air baku.

Ketersediaan air baku untuk irigasi pada sawah teknis pada tahun 2015 sebesar 7634 ltr/detik (70%). Setelah dilakukan penanganan perbaikan dan pemeliharaan pada infrastruktur irigasi, ketersediaan air baku pada tahun 2021 menjadi 9136 ltr/detik (100%), sedangkan target awal tahun 9136 ltr/detik (100%).

Kabupaten Tuban merupakan lumbung padi di Jawa Timur, hal ini didukung oleh kondisi geografis dilaluinya DAS Bengawan Solo yang memberi keuntungan lahan pertanian yang subur. Maka sebagian besar mata pencaharian penduduk Kabupaten Tuban adalah dibidang pertanian. Oleh karena itu Sektor pertanian menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Tuban. Dalam rangka meningkatkan hasil pertanian harus didukung oleh infrastruktur Sistem Jaringan Irigasi, dan dalam mendukung kinerja Sistem Jaringan Irigasi tersebut maka perlu dilakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi. Daerah Irigasi di Kabupaten Tuban sebanyak 53 DI, dengan luas lahan 20.855 Ha. Luas lahan tersebut terdiri dari 10.755 Ha (51,57%) Sawah teknis, 7.748 Ha (37,15%) Sawah setengah teknis, dan 2.352 Ha (11,28%) Sawah sederhana. Adapun kondisi infrastruktur pangairan sebagaimana tabel berikut :

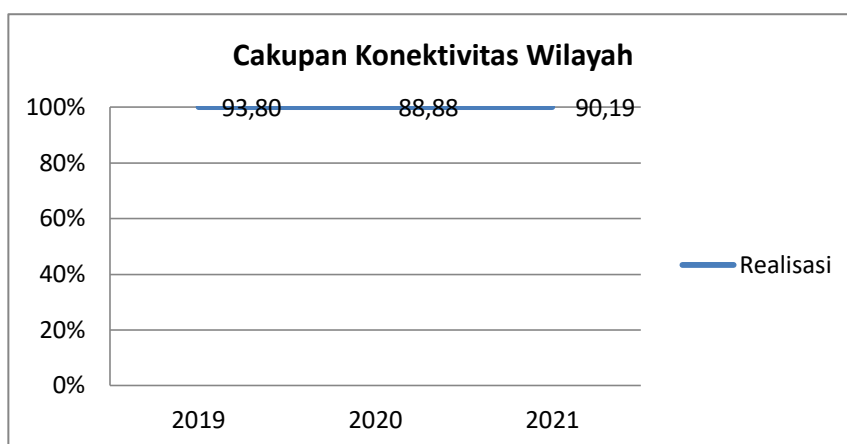
Tabel 15 Kondisi Prasarana Pengairan Tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021		
		Volume M'/Bh	Kondisi		Volume M'/Bh	Kondisi	
			M'/Bh	%		M'/Bh	%
1	Saluran Induk - Baik - Rusak	11,617	11.617 0	100,00 0	11,617	11.617 0	100,00 0
2	Saluran Sekunder - Baik - Rusak	137.540	113.640 23.900	82,62 17,38	137.540	113.640 23.900	82,62 17,38
3	Saluran Pembuang - Baik - Rusak	75.247	73834,75 1412,25	98,12 1,88	75.247	73834,75 1412,25	98,12 1,88
4	Bangunan - Baik - Rusak	377	316 61	83,82 16,18	377	316 61	83,82 16,18
5	Bendung - Baik - Rusak	37	37 0	100,00 -	37	37 0	100,00 -
6	Waduk - Baik - Rusak	19	18 1	94,74 5,26	19	18 1	94,74 5,26
7	Pompa P2AT - Baik - Rusak	77	77 0	100,00 -	77	77 0	100,00 -

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

4. Meningkatnya Cakupan Konektivitas Jalan Dan Jembatan

Grafik 4. Cakupan Konektivitas Wilayah



Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019, kondisi jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan yaitu tahun 2019 dengan realisasi sebesar 93,8% di tahun 2020 dengan realisasi sebesar 88,88%, dan di tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu realiasi yang didapatkan sebesar 90,19%.

Cakupan Konektivitas Wilayah diwujudkan dengan dibangunnya infrastruktur jalan yang mantap, serta prasarana jalan yang memadai guna mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah.

Prasarana jalan yang mantap dan memadai akan mampu membuka akses wilayah serta mendorong pengembangan berbagai asset dan potensi ekonomi lokal. Seiring dengan meningkatnya investasi di Kabupaten Tuban maka kebutuhan akan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kondisi baik juga semakin meningkat. Dikarenakan keberadaan fungsi jalan yang sangat vital, maka diperlukan pula adanya pemeliharaan, baik rutin maupun berkala secara kontinue.

Dalam rangka konektivitas wilayah dibutuhkan sarana prasarana jalan kabupaten/poros desa dalam kondisi baik, target untuk mengetahui capaiannya dilakukan dengan cara membandingkan jalan dalam kondisi baik dengan total panjang ruas jalan.

Kondisi jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan dan belum memenuhi target yaitu dari target tahun 2021 sebesar 93 % realisasinya hanya dapat dicapai sebesar 90,19 % (tidak memenuhi target) akan tetapi realisasi capaian pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 88,88 %. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya penambahan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2021, sedangkan untuk realisasi indikator kinerja tidak mencapai target disebabkan adanya kerusakan pada sebagian ruas jalan yang baru selesai diadakan penanganan sering disusul adanya kerusakan pada titik-titik lainnya, yang semula dalam kondisi baik menjadi kondisi sedang bahkan menurun menjadi rusak, disamping

itu juga adanya curah hujan yang tinggi, akan tetapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya terus didalam penanganan jalan/jembatan baik berupa pekerjaan pemeliharaan berkala atau rutin maupun peningkatan dan pelebaran serta sarana dan prasarana jalan. Sampai dengan akhir tahun 2021 dari total panjang jalan Kabupaten dan Poros Desa 1.811,64 km, dalam kondisi baik hanya mencapai 1.633,98 km, sedangkan sisanya sebagian dalam kondisi sedang dan ringan. Sedangkan untuk pembangunan Jembatan Pendekat Jembatan Glendeng sudah tuntas secara keseluruhan guna mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah Tuban dan Bojonegoro.

Adapun perkembangan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Tuban pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Kondisi Prasarana Jalan Tahun 2020-2021

No	Jenis Jalan	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan											
			Tahun 2020						Tahun 2021					
			Baik		Sedang		Rusak		Baik		Sedang		Rusak	
			Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)	Km	(%)
1	2	3	4		5		6		7		8		9	
1	Jalan Kabupaten	750,02	689,43	91,90	37,39	4,98	23,40	3,11	677,85	90,35	24,00	3,20	48,37	6,44
2	Jalan poros desa	1.061,42	920,78	86,75	89,48	8,43	51,25	4,82	956,13	90,08	39,15	3,69	66,14	6,23
	Jumlah total	1.811,44	1.610,21	88,88	126,87	7,00	74,65	4,12	1.633,98	90,19	63,15	3,49	114,51	6,32

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

3.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dapat dilihat pada tabel berikut:

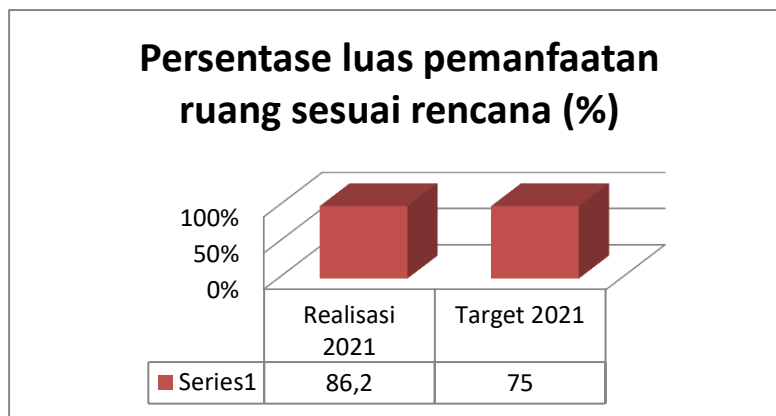
Tabel 17 Realisasi Kinerja tahun 2021 dan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2021	2021	
1	Meningkatnya Pemanfaatan ruang sesuai rencana	Persentase luas Pemanfaatan ruang sesuai rencana	86,2	75	115
2	Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan	Persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam)	78	78	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	TINGKAT KEMAJUAN (%)
			2021	2021	
3	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Cakupan ketersediaan air baku/irigasi	100	100	100
4	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Cakupan Konektivitas Wilayah	90,19	93	97

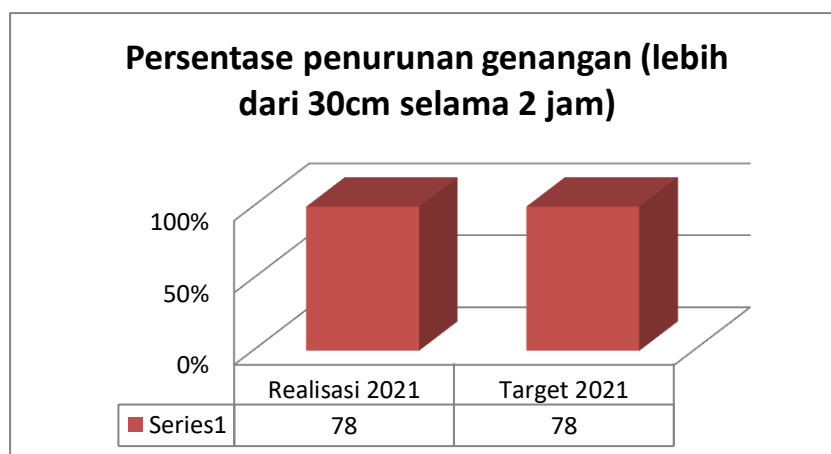
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Grafik 5. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah untuk Indikator persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana



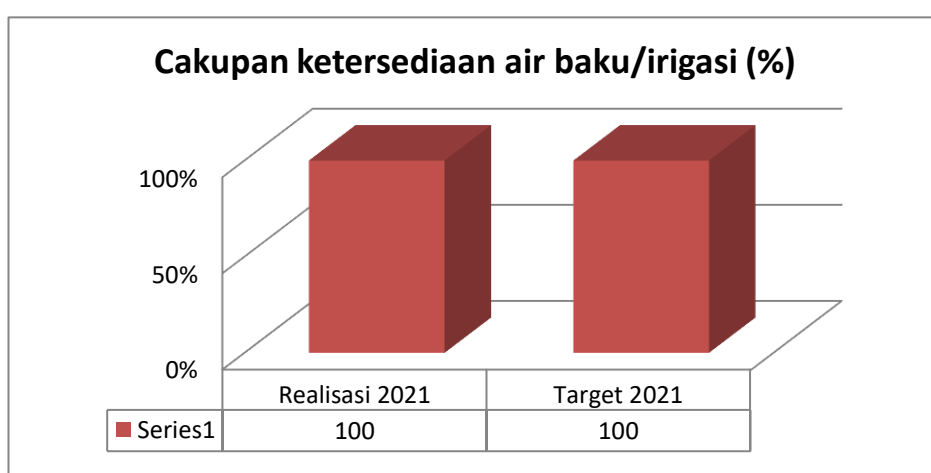
Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana pada tahun 2021 sebesar 86,2% dari target ditahun 2021 sebesar 75%, dengan tingkat capaian sebesar 115% yang menunjukkan realisasi pada tahun 2021 telah melampaui target tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban cukup baik di tahun 2021 dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian ulang pada tahun berikutnya.

Grafik 6. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah untuk Indikator persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam)



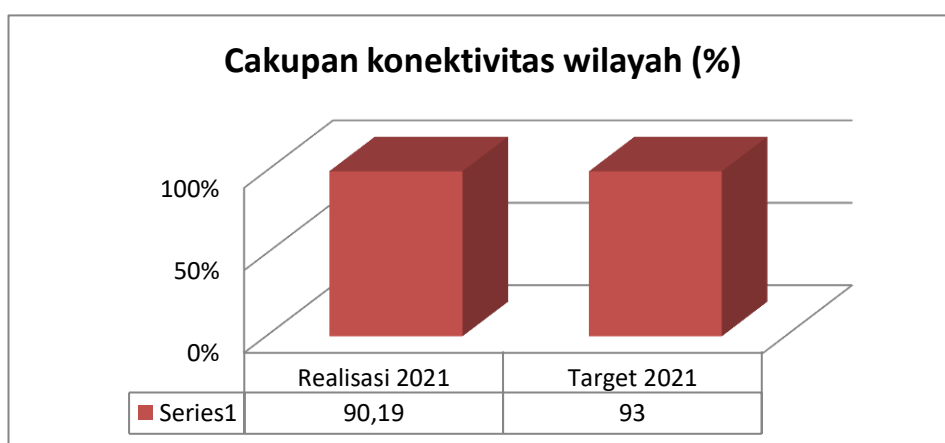
Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam) pada tahun 2021 sebesar 78% dan target di tahun 2021 sebesar 78%, dengan tingkat capaian sebesar 100% yang menunjukkan realisasi pada tahun 2021 telah mencapai target tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban yang baik di tahun 2021 dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan. Dari data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan kajian ulang pada tahun berikutnya.

Grafik 7. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah untuk Indikator cakupan ketersediaan air baku/irigasi



Dari tabel 15 dan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase cakupan ketersediaan air baku/irigasi pada Tahun 2021 sebesar 100% dari target di tahun 2021 sebesar 100%, dengan tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban yang baik di tahun 2021 telah mencapai target dengan program kegiatan yang telah dilaksanakan.

Grafik 8. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan target jangka menengah untuk Indikator persentase cakupan konektivitas wilayah



Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi persentase cakupan konektivitas wilayah pada tahun 2021 sebesar 90,19% dari target di tahun 2021 sebesar 93%, dengan tingkat capaian sebesar 97%. Pada indikator ini belum

memenuhi target tahun 2021 yang ditetapkan. Namun demikian, capaian kinerja tahun 2021 telah meningkat dari tahun 2020. Dari data tersebut, dapat dijadikan bahan acuan dalam penentuan target untuk tahun yang akan datang.

Untuk indikator nilai AKIP Perangkat Daerah, pada tahun 2021 mencapai A dan memenuhi target 100%. Target di tahun 2021 adalah A.

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban, dapat dikatakan berhasil dalam pencapaian target-target yang ditetapkan sesuai rencana strategis dinas tahun 2016-2021. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a) Komitmen antara Pimpinan sampai dengan Staf terhadap pencapaian kinerja utama maupun individu;
- b) Adanya program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama;
- c) Tersedianya dana APBD maupun PAPBD yang turut serta menunjang capaian indikator kinerja utama;
- d) Tersedianya teknologi yang memadai;
- e) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung capaian indikator kinerja utama;
- f) Aparatur yang sesuai dengan bidang dan keahliannya;
- g) Adanya Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan tugas; dan
- h) Faktor lingkungan.

Meskipun begitu, terdapat indikator kinerja yang masih belum memenuhi target yaitu cakupan konektivitas wilayah dengan target 2021 sebesar 93% dan tercapai sebesar 90,19%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini:

- a) *Pandemic covid-19* yang menyebabkan beberapa pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai yang direncanakan;
- b) Dalam realita dilapangan menunjukkan bahwa untuk titik-titik kerusakan pada sebagian ruas jalan yang baru selesai diadakan penanganan sering disusul adanya kerusakan pada titik lainnya , yang semula dalam kondisi baik menjadi kondisi sedang bahkan menurun menjadi rusak, yang disebabkan yaitu 1). Umur manfaat sudah terlampaui sehingga membutuhkan pemeliharaan/ perbaikan, 2) Struktur tanah yang kurang mendukung / labil, 3) Kondisi alam yang ekstrem.

- c) Kurangnya jumlah tenaga kerja pelaksana dan proyek pelaksana lebih dari satu pekerjaan yang mengakibatkan pelaksanaan di lapangan menjadi kurang maksimal;
- d) Terjadinya perubahan desain rencana karena faktor kondisi alam yang ekstrem;
- e) Terlambatnya pekerjaan karena waktu yang melebihi SPMK; dan
- f) Pengujian mutu di lapangan tidak sesuai dengan rencana;

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pencapaian indikator kinerja utama yaitu:

- a. Lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencapaian indikator kinerja yang telah ditargetkan;
- b. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan;
- c. *Review* desain terlebih dahulu sebelum mulai pekerjaan.

Upaya untuk menunjang keberhasilan kinerja terus dilakukan dalam meningkatkan cakupan konektivitas wilayah (jalan dan jembatan) berupa kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota dan penambahan anggaran pada program dan kegiatan tersebut. Dengan begitu, kebutuhan akan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap semakin meningkat. Guna menjaga agar jalan/jembatan kabupaten tetap dalam kondisi mantap telah diupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kuatintan jalan/jembatan melalui pembangunan baru, peningkatan dan pemeliharaan.

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumberdaya adalah ukuran tingkat penggunaan sumberdaya dalam suatu kegiatan/proses. Dalam rencana kinerja tahunan pagu anggaran untuk merealisasikan indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 sebesar Rp 296.320.189.988,00 dan terealisasi sebesar Rp 213.343.374.305,97 atau dengan kata lain tingkat penyerapan anggaran sebesar 72% dengan efisiensi anggaran sebesar 28%. Rincian penggunaan anggaran berdasarkan sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 18 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Anggaran		Efisiensi (%)
					Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai rencana	Persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana	75	86,2	43.694.437.500,00	38.199.465.650,00	12,58
2	Berkurangnya genangan air di wilayah rawan genangan	Persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam)	78	78	37.546.106.864,00	27.411.575.714,00	26,99
3	Meningkatnya kinerja system irigasi	Cakupan ketersediaan air baku/irigasi	100	100	29.990.491.390,00	15.899.132.758,00	46,99
4	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Cakupan konektivitas wilayah	93	90,19	169.099.857.437,00	117.979.540.475,97	30,23
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah DPUPR	A	A	15.989.296.797,00	13.853.659.708,00	13,36

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Tabel 19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya berdasarkan Program

NO	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.275.000.000,00	1.100.119.000,00	13,72
2	Program Penataan Bangunan Gedung	41.594.437.500,00	36.344.825.650,00	12,62
3	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	800.000.000,00	746.116.400,00	6,74
4	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	25.000.000,00	8.404.600,00	66,38
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	67.536.598.254,00	43.310.708.472,00	35,87
6	Program Penyelenggaraan Jalan	169.099.857.437,00	117.979.540.475,97	30,23
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	15.989.296.797,00	13.853.659.708,00	13,36
Total Anggaran		296.320.189.988,00	213.343.374.305,97	72,00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian kinerja indikator persentase luas pemanfaatan ruang sesuai rencana, dengan pagu anggaran sebesar Rp 43.694.437.500,00 dan realisasi sebesar Rp 38.199.465.650,00 dengan tingkat efisiensi 12,58%. Rincian dari indikator kinerja tersebut berupa:

- a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 1.100.119.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 1.275.000.000,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar 13,72%.
- b. Program Penataan Bangunan Gedung dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 41.594.437.500,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 36.344.825.650,00 sehingga tingkat efisiensi sebesar 12,62%.
- c. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 800.000.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 746.116.400,00 sehingga tingkat efisiensi sebesar 6,47%.
- d. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 8.404.600,00 sehingga tingkat efisiensi sebesar 66,38%.

Selanjutnya, capaian kinerja indikator persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam), dengan pagu anggaran sebesar Rp 37.546.106.864,00 dan realisasi sebesar Rp 27.411.575.714,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 26,99%.

Pada capaian kinerja indikator cakupan ketersediaan air baku/irigasi dengan pagu anggaran sebesar Rp 29.990.491.390,00 dan realisasi sebesar Rp 15.899.132.758,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 46,99%. Rincian dari kedua indikator utama tersebut berupa:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 43.310.708.472,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 67.536.598.254,00 sehingga tingkat efisiensi sebesar 35,87%.

Kemudian, capaian indikator kinerja cakupan konektivitas wilayah dengan pagu anggaran sebesar Rp 169.099.857.437,00 dan realisasi sebesar Rp 117.979.540.475,97. Dengan rincian berupa Program Penyelenggaraan Jalan. Sehingga tingkat efisiensinya sebesar 30,23%.

Pada indikator penunjang yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah DPUPR dengan pagu anggaran sebesar Rp 15.989.296.797,00 dan realisasi sebesar Rp 13.853.659.708,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 13,36% dengan rincian berupa Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

3.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dapat dikatakan berhasil dalam memenuhi sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Rata-rata tingkat pencapaian dari sasaran strategis tersebut adalah 103%. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut ditunjang oleh program-program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban. Keberhasilan tersebut dapat meningkatkan infrastruktur yang ada sehingga juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan anggaran 2021 berjumlah 7 program (6 program utama serta 1 program pendukung) dan 13 kegiatan. Program tersebut antara lain:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini memiliki target 81,25% dan telah tercapai sebesar 81,25%. Keberhasilan program dalam mencapai target tentu didukung oleh kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tuban adalah untuk mewujudkan Kabupaten Tuban sebagai penyangga kecamatan–kecamatan kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penataan ruang Kabupaten Tuban disusun sesuai potensi dan permasalahan baik internal maupun eksternal serta memperhatikan perencanaan tata ruang pada tingkat yang lebih tinggi seperti RTRW Provinsi Jawa Timur.

Salah satu permasalahan dalam penataan ruang adalah adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian yang terjadi pada setiap tahun. Perubahan fungsi lahan pertanian tersebut antara lain berubahnya fungsi menjadi lahan terbangun terutama untuk perumahan, perdagangan dan industri. Dalam rangka meningkatkan Kondisi tersebut disebabkan upaya yang terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketersediaan regulasi terkait rencana detail tata ruang, di mana akan dilakukan secara bertahap mulai dari proses penyusunan, materi teknis, penyusunan raperda, hingga menjadi perda. Selain itu, keberhasilan yang diperoleh karena adanya dukungan dari seluruh instansi pemerintah Kabupaten Tuban yang terkait sehingga penyusunan dokumen bisa mengakomodir berbagai kebijakan yang ingin dicapai serta diselesaikan tepat waktu dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya melalui

peningkatan peran serta masyarakat dan penyediaan informasi rencana tata ruang wilayah serta pengawasan pemanfaatan ruang.

2. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini memiliki target 100% dan telah tercapai sebesar 100%. Keberhasilan program dalam mencapai target didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dengan 6 paket SLF yang diterbitkan.

Penyebab keberhasilan program dan kegiatan karena kerjasama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, sumber daya manusia yang dimiliki memenuhi kualitas yang baik dan kuantitas yang memadai, perencanaan teknis serta pelaksanaan konstruksi yang telah matang.

3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini memiliki target 6% dan telah tercapai sebesar 6%. Keberhasilan program dalam mencapai target didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota. Keberhasilan program dan kegiatan karena kerjasama dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, sumber daya manusia yang dimiliki memenuhi kualitas yang baik dan kuantitas yang memadai, perencanaan teknis serta pelaksanaan konstruksi yang telah matang.

4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini memiliki target 100% dan terealisasi sebesar 100%. Keberhasilan program dalam mencapai target tentu didukung oleh kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi dengan target 1 dokumen yang telah terpenuhi. Pada kegiatan ini telah diupayakan agar tidak ada kecelakaan konstruksi, serta terus diupayakan agar operator/teknisi yang memiliki sertifikat konstruksi semakin meningkat. Untuk kedepannya, terus dilakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak yang bersangkutan contohnya meningkatkan koordinasi dengan DPMPTSP.

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini memiliki dua indikator yaitu persentase sarana pengendali banjir dalam kondisi baik dengan target 100% dan telah tercapai sebesar 100%. Pencapaian ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan panjang 6.065 m². Sebagaimana yang telah dilaksanakan setiap tahunnya, untuk mengatasi permasalahan banjir terus diupayakan penanganannya melalui Pembangunan Bendungan, Pembangunan Tanggul Sungai, Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, Revitalisasi dan

Pemeliharaan Danau, Operasional dan Pemeliharaan Sungai, Pompa mobile, Floating Excavator (pontoon), Kendaraan khusus(Self Loader). Selain itu, pemeliharaan infrastruktur juga harus tetap dipelihara. Indikator yang kedua yaitu persentase saluran irigasi dalam kondisi baik dengan target 97,27% dan terealisasi sebesar 97,27% sehingga capaian indikator tersebut 100%. Hal ini didukung oleh kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha. Irigasi merupakan prasarana untuk meningkatkan produktivitas lahan, baik dalam meningkatkan produktivitas per hektar, maupun meningkatkan intensitas panen pertahun. Dalam menunjang ketersediaan air baku irigasi untuk pertanian, dibutuhkan infrastruktur irigasi yang memadai. Seperti halnya kegiatan di atas, untuk kegiatan ini juga telah diupayakan penanganannya setiap tahun secara maksimal contohnya dengan pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

6. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini memiliki target 93% namun hanya terealisasi sebesar 90,19%. Hal ini didukung oleh kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota dengan panjang 199,05km. Pada program ini belum memenuhi target yang ditetapkan. Salah satu penyebabnya dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi sehingga merusak kondisi jalan serta kontur tanah yang labil. Realita di lapangan menunjukkan bahwa untuk titik-titik kerusakan pada sebagian ruas jalan yang baru selesai diadakan penanganan sering disusul adanya kerusakan pada titik lainnya, yang semula dalam kondisi baik menjadi kondisi sedang bahkan menurun menjadi rusak. serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara (tonase) juga mempengaruhi kondisi ini. Untuk kedepannya, diperlukan mekanisme pelaksanaan yang detail sehingga setiap pelaksanaan dapat mengoptimalkan keinginan yang ingin dicapai sesuai program dan kegiatan yang telah ditentukan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan jalan kabupaten maupun jalan poros desa semakin dalam kondisi yang baik.

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

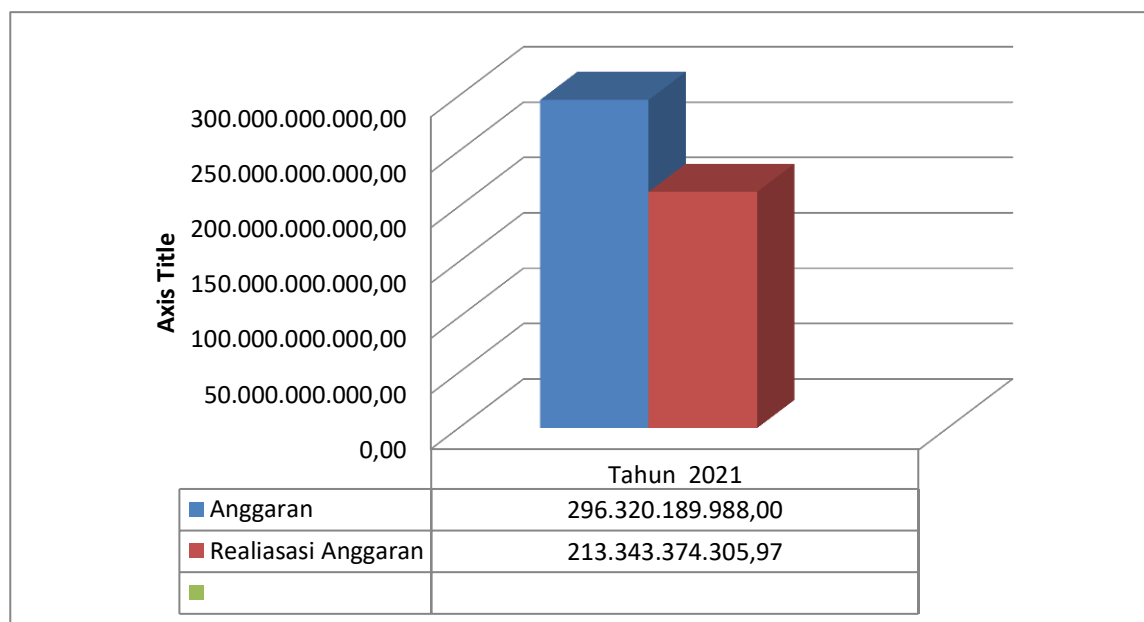
Program ini memiliki target nilai AKIP yaitu A dan terealisasi A. keberhasilan program tidak lepas dari keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang menunjang program yaitu Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Untuk kedepannya, meningkatkan pelatihan untuk sumberdaya aparatur sehingga dapat semakin akuntabel dan kredibel. Serta

diperlukan sumber daya aparatur yang bersinergi satu sama lain untuk menunjang seluruh program atau kegiatan yang akan datang sehingga nilai AKIP juga semakin meningkat.

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tuban baik untuk urusan bidang pekerjaan umum maupun penataan ruang yang ditunjang dengan anggaran sebesar Rp 296.320.189.988,00 yang berasal dari APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021 telah dapat terealisasi sampai bulan Desember 2021 sebesar Rp 213.343.374.305,97 atau 72%.

Grafik 9. Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021



Tabel 20 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban tahun 2021

Perangkat Daerah Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	296.320.189.988,00	213.343.374.305,97	72,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	15.989.296.797,00	14.072.297.050,00	88,01
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160.214.600,00	142.031.200,00	88,65
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.833.500,00	64.638.200,00	89,98
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.381.100,00	77.393.000,00	87,57
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.987.323.910,00	12.253.131.634,00	87,60
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.611.396.410,00	11.949.432.159,00	87,79
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	375.927.500,00	303.699.475,00	80,79

Perangkat Daerah Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Administrasi Perangkat Daerah	596.276.657,00	354.027.586,00	59,37
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	4.842.300,00	80,71
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	195.498.707,00	149.901.000,00	76,68
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	156.778.200,00	67.014.000,00	42,74
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.999.750,00	9.029.300,00	18,06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000,00	13.680.000,00	76,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170.000.000,00	109.560.986,00	64,45
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	687.259.580,00	638.798.218,00	92,25
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.790.000,00	646.801,00	11,17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	192.600.000,00	165.490.777,00	85,92
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.500.000,00	5.850.000,00	37,74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	473.369.580,00	466.810.640,00	98,61
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	558.222.050,00	465.671.070,00	83,42
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	243.494.050,00	186.885.370,00	76,75
Pemeliharaan Mebel	24.960.000,00	16.700.000,00	66,91
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	134.768.000,00	107.992.100,00	80,13
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.000.000,00	154.093.600,00	99,42
Program Penyelenggaraan Jalan	169.099.857.437,00	117.979.540.475,97	69,77
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	169.099.857.437,00	117.979.540.475,97	69,77
Perencanaan Teknis	860.000.000,00	787.526.000,00	91,57
Pembebasan Lahan /Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	255.000.000,00	244.806.615,00	96,00
Pengelolaan Leger Jalan	100.000.000,00	99.224.550,00	99,22
Survey Kondisi Jalan	400.000.000,00	396.512.150,00	99,13
Pembangunan Jalan	600.000.000,00	466.773.258,62	77,80
Pelebaran Jalan Menuju Standar	6.790.000.000,00	6.130.840.362,56	90,29
Rekonstruksi Jalan	18.140.500.000,00	11.360.411.879,99	62,62
Rehabilitasi Jalan	25.047.050.000,00	22.953.979.434,42	91,64
Pemeliharaan Berkala Jalan	61.975.500.000,00	34.751.285.765,40	56,07

Perangkat Daerah Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pemeliharaan Rutin Jalan	38.299.307.075,00	28.589.503.818,72	74,65
Pembangunan Jembatan	6.855.000.362,00	4.397.273.150,00	64,15
Penggantian Jembatan	4.717.500.000,00	3.476.926.737,25	73,70
Rehabilitasi Jembatan	5.060.000.000,00	4.324.476.754,01	85,46
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	67.536.598.254,00	43.310.708.472,00	64,13
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.546.106.864,00	27.411.575.714,00	73,01
Pembangunan Bendungan	18.836.120.000,00	18.141.978.264,00	96,31
Pembangunan Tanggul Sungai	6.169.960.000,00	28.035.000,00	0,45
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	5.959.953.141,00	4.385.037.500,00	73,58
Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau	630.074.048,00	571.445.000,00	90,69
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	49.999.675,00	0	0,00
Operasional dan Pemeliharaan Sungai	5.900.000.000,00	4.285.079.950,00	72,63
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha	29.990.491.390,00	15.899.132.758,00	53,01
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	2.010.000.085,00	1.472.082.000,00	73,24
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4.867.712.338,00	4.092.871.000,00	84,08
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	22.172.778.967,00	9.463.547.758,00	42,68
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	940.000.000,00	854.432.000,00	90,90
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.275.000.000,00	1.100.119.000,00	86,28
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	1.175.000.000,00	1.050.513.700,00	89,41
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1.175.000.000,00	1.050.513.700,00	89,41
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	49.605.300,00	49,61
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	100.000.000,00	49.605.300,00	49,61

Perangkat Daerah Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penataan Bangunan Gedung	41.594.437.500,00	36.344.825.650,00	87,38
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	41.594.437.500,00	36.344.825.650,00	87,38
Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	99.972.500,00	0,00	0,00
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubah sesuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	41.494.465.000,00	36.344.825.650,00	87,38
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	800.000.000,00	746.116.400,00	93,26
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000,00	746.116.400,00	93,26
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	25.000.000,00	8.404.600,00	33,62
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	25.000.000,00	8.404.600,00	33,62
JUMLAH	296.320.189.988,00	213.343.374.305,97	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan alokasi anggaran Rp 296.320.189.988,00 dan terealisasi sebesar Rp 213.343.374.306,97 atau 72%. Adapun rincian penggunaan anggaran sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan kegiatan:

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp 1.175.000.000,00 yang digunakan untuk Penyusunan RDTR Jenu, Rengel, Kerek, Plumpang, Penyusunan Peta Dasar Kabupaten Tuban, Persetujuan Substansi RDTR Perkotaan Bancar dengan sub.kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.050.513.700,00 atau 89,41%.

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp 100.000.000,00 yang digunakan untuk Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan dan Pertanahan, dengan sub kegiatan koordinasi pelaksanaan penataan ruang dengan realisasi anggaran Rp 49.605.300,00 atau 49,61%.

2. Program Penataan Bangunan Gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 41.594.437.500,00 digunakan untuk Penyelenggaraan penerbitan ijin mendirikan bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG untuk Penyelenggaraan TABG dan SLF tidak dilaksanakan karena adanya perubahan regulasi berkenaan penerbitan SLF.

Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubah sesuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk Rehab Makodim 0811/Tuban, Rehab Mapolres Tuban, Pembangunan Gedung MPP Tahap 2 dan Penunjangnya, Pembangunan Gedung Kantor calon Pengganti Pengadilan Negeri Tuban serta Rehab Koramil 0811 (Tuban, Palang, Plumpang, Soko, Widang, Jatirogo, Bangilan, Bancar, Kerek dan Senori). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 36.344.825.650,00 atau 87,38%.

3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 800.000.000,00 yang digunakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/kota yang digunakan untuk Penyusunan RTBL Koridor Jalan Fatkur Rahman Kecamatan Merakurak, DED Taman tahun 2022 (Penataan Bangunan dan Lingkungan Taman Kapur, Penataan

Bangunan dan Lingkungan Hutan Kota, Penataan Bangunan dan Lingkungan GOR, Penataan Bangunan dan Lingkungan Alun-alun Tuban dan Pantai Wisata Boom). Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 746.116.400,00 atau 93,86%.

4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 dengan kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dan sub kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang digunakan untuk monitoring pelaksanaan K3 pada pekerjaan konstruksi di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dengan realisasi anggaran sebesar Rp 8.404.600,00 atau 33,62%.

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan kegiatan:

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 37.546.106.864,00 yang digunakan untuk: Pembangunan Bendungan, Pembangunan Tanggul Sungai, Pembangunan Bangunan Perkuat Tebing, Revitalisasi dan Pemeliharaan Danau, Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota, Operasional dan Pemeliharaan Sungai. Dari subkegiatan dan kegiatan tersebut, didapatkan realisasi anggaran sebesar Rp 27.411.575.714,00 atau 73,01%.

b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dengan alokasi anggaran sebesar Rp 29.990.491.390,00 yang digunakan untuk Pembangunan jaringan irigasi permukaan, Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa. Dari rincian tersebut, realisasi anggaran sebesar Rp 15.899.132.758,00 atau 53,01%.

6. Program Penyelenggaraan Jalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 169.099.857.437,00 dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk penanganan jalan sepanjang 199,05 km. Sub kegiatan yang dijalankan adalah Pembangunan Jalan (1 pekerjaan), Pelebaran Jalan Menuju Standar (5 pekerjaan), Rekonstruksi Jalan (9 pekerjaan), Rehabilitasi Jalan (21 pekerjaan), Pemeliharaan Berkala Jalan (59 pekerjaan), Pemeliharaan Rutin Jalan (40 pekerjaan), Pembangunan Jembatan (4 pekerjaan), Penggantian Jembatan (12 pekerjaan dengan 1 pekerjaan gagal tender yaitu pengantian jembatan maindu kecamatan montong), Rehabilitasi Jembatan (8 pekerjaan), Perencanaan teknis untuk kegiatan tahun 2022 (8 paket), Pembebasan Lahan /Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan (Pembebasan Tanah Pembangunan Jembatan Kanor), Pengelolaan Leger Jalan (1 paket), Survey Kondisi Jalan (4 paket). Adapun realisasi anggaran dari rincian tersebut yaitu Rp 117.979.540.475,97 atau 69,77%.

7. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.989.296.797,00 untuk kegiatan:
- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar 160.214.600,00 sebanyak 9 dokumen meliputi Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 142.031.200,00 atau 88,65%.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.987.323.910,00 meliputi gaji dan tunjangan ASN sebanyak 142 orang dan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN selama satu tahun dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.253.131.634,00 atau 87,60%.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 596.276.657,00 meliputi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama satu tahun. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 354.027.586,00 atau 59,31%.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 687.259.580,00 meliputi Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama satu tahun. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 638.798.218,00 atau 92,25%.
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 558.222.050,00 meliputi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama satu tahun. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp 465.671.070,00 atau 83,42%.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 secara umum sudah tercapai. Mengacu hasil analisis terhadap capaian kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum telah memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan target sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dengan capaian akhir kinerja sebesar 103%.

Dari indikator kinerja utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator yang mencapai target yaitu persentase penurunan genangan (lebih dari 30cm selama 2 jam) dengan target 78% dan terealisasi sebesar 78% sehingga capaian kinerja yang didapatkan 100%. Persentase ketersediaan air baku/irigasi dengan target 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja yang didapatkan juga 100%.
2. Indikator telah melampaui target yaitu persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana dengan target 75% dan terealisasi sebesar 86,2% sehingga capaian kinerja sebesar 115%.
3. Indikator di bawah target yang ditetapkan yaitu cakupan konektivitas wilayah dengan target 93% dan terealisasi sebesar 90,19% sehingga capaian kinerja sebesar 97%.

Keberhasilan capaian kinerja tentu saja dikarenakan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan anggaran sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2021, perlu ditingkatkan lagi pada tahun 2022, maka dari itu diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja yaitu:

1. Persiapan yang lebih matang untuk program dan kegiatan mendatang
2. Perencanaan anggaran yang lebih baik
3. Pemahaman mengenai Standar Operasional Prosedur perlu ditingkatkan lagi.
4. Pengembangan sarana dan prasarana wilayah secara terpadu dan terkoneksi.

Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 telah disusun sesuai dengan kondisi yang ada dari keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif telah diupayakan untuk dapat diterapkan dalam setiap langkah. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang ada dapat diterima sebagai acuan dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban Tahun 2021 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TUBAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AGUNG SUPRIYADI, SE

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE.

Jabatan : Bupati Tuban

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tuban, 1 Oktober 2021

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

AGUNG SUPRIYADI, SE.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710124 199402 1 001

Pihak Kedua,
BUPATI TUBAN

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE.

**LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TUBAN**

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana	1. Persentase Luas Pemanfaatan Ruang Sesuai Rencana	75 %
2	Berkurangnya Genangan di Wilayah Rawan Genangan	2. Persentase Genangan (Lebih dari 30 cm Selama 2 jam)	78%
3	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	3. Cakupan Ketersediaan Air Baku/Irigasi	100 %
4	Meningkatnya Cakupan Konektivitas Jalan dan Jembatan	4. Cakupan Konektivitas Wilayah	93 %
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	5. Nilai AKIP Dinas PUPR	A (80,1)

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 15.989.296.797,00	PAPBD
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 67.536.598.254,00	PAPBD
3. Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 41.594.437.500,00	PAPBD
4. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 800.000.000,00	PAPBD
5. Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 169.099.857.437,00	PAPBD
6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 25.000.000,00	PAPBD
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.275.000.000,00	PAPBD
JUMLAH	Rp. 296.320.189.988,00	

Tuban, 1 Oktober 2021

Pihak Kedua,
BUPATI TUBAN


ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE.

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG


AGUNG SUPRIYADI, SE.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710124 199402 1 001

PIKENDALIAN DAN EVALUASI KINERJA OPD TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TUBAN

No	Sasaran	IKU	Formulasi $f(x) = a/b \times 100\%$	Penanggung Jawab	Satuan	Data Base 2015	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (persen)	
1	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai rencana	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana	Jumlah luas pemanfaatan ruang dibagi Jumlah luas rencana tata ruang x 100%	Dinas PUPR	%	5	75	86,2	115	
			Jumlah luas pemanfaatan ruang					169980,73		
			Jumlah luas rencana tata ruang					197217,53		
2	Berkurangnya genangan di wilayah rawan genangan	Persentase penurunan genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam)	Luas daerah genangan pada tahun dasar dikurangi luas daerah genangan pada tahun n dibagi total luas daerah genangan x 100%	Dinas PUPR	%	72	78	78	100	
			Luas daerah genangan pada tahun dasar					14.541		14.541
			luas daerah genangan pada tahun n					4.100		3.200
			Total luas daerah genangan (ha)					14.541		14.541
3	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Persentase Ketersediaan Air Baku/Irigasi	Jumlah ketersediaan air irigasi/air baku dibagi Jumlah kebutuhan air irigasi /air baku x 100%	Dinas PUPR	%	45	100	100	100	
			Jumlah ketersediaan air irigasi/air baku (liter/dtk)					4.111		9136
			Jumlah kebutuhan air irigasi/air baku (liter/dtk)					9.136		9136
4	Meningkatnya cakupan konektivitas jalan dan jembatan	Cakupan Konektivitas Wilayah	Jumlah akhir tahun SPM panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi dibagi target keseluruhan panjang jalan penghubung pusat pusat kegiatan dan produksi x 100%	Dinas PUPR	%	92,47	93	90,19	96,98	
			Jumlah akhir tahun SPM panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan produksi (km)					132553		1634
			Jumlah target keseluruhan panjang jalan penghubung pusat pusat kegiatan dan produksi (km)					143342		1811,64
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Dinas PUPR	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten berdasarkan kriteria dari Kementerian PAN dan RB	Dinas PUPR		N/A	81,32 (A)	81,32 (A)	100	

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>1.Mewujudkan konektivitas melalui jalan dan jembatan pada jalan kabupaten, poros desa yang mantap.</p> <p>2.Tersedianya kebutuhan air baku dan jaringan irigasi serta infrastruktur peng-airan lainnya serta sarana bangunan pengendali banjir</p> <p>3.Mewujudkan tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang dalam rangka Pengendalian pemanfaatan ruang</p>	Program Penyelenggaraan Jalan	93 %	90,19%
				Keg.Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	199,05 km	199,05 km
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100%	100%
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6065 m2	6065 m2
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	97,27%	97,27%
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha	2600 m	2600 m

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	81,25%	81,25%
				Keg.Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	3 dok	3 dok
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket
				Program Penataan Bangunan Gedung	100%	100%
				Penyelenggaraan Ba-ngunan Gedung di Wilayah Daerah Kabu-paten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	6 Paket	6 Paket
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	6%	6%
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5 paket	5 Paket
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100%	100%
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dok	1 Dok
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	A (81,32)	A (81,32)
				Perencanaan, Penga-nggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	9 Dok
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Dok	9 Dok
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis	6 Jenis

No	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program dan Kegiatan	Target	Realisasi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Jenis	4 Jenis
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	4 Jenis